



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

# BUKU PROGRAM SAKU PRIORITAS 2023

- INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)
- PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (PSI)
- MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (MONEV)

[WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID](http://WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID)



komisiinformasipti



Komisi Informasi Pusat



@KIP-Pusat





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

# BUKU PROGRAM SAKU PRIORITAS 2023

- INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)
- PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (PSI)
- MONITORING EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (MONEV)

[WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID](http://WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID)



[komisiinformasipusat](https://www.instagram.com/komisiinformasipusat)



[Komisi Informasi Pusat](https://www.facebook.com/komisiinformasipusat)



[@KIP\\_Pusat](https://twitter.com/KIP_Pusat)

## Komisiner

Donny Yoesglantoro  
Arya Sandhiyudha  
Rospita Vici Paulyn

Samrotunnajah Ismail  
Syawaluddin  
Handoko Agung Saputro  
Gede Narayana

Ketua KI Pusat  
Wakil Ketua KI Pusat  
Komisiner Bidang Penelitian &  
Dokumentasi  
Komisiner Bidang ASE  
Komisiner Bidang PSI  
Komisiner Bidang Kelembagaan  
Komisiner Bidang Regulasi &  
Kebijakan Publik

## Tim Penyusun

### Koordinator

Rospita Vici Paulyn  
Komisiner Bidang Penelitian &  
Dokumentasi

### Editor

Annie Londa  
Meida Simamora

### Desain dan Tata Letak

Fikri Muhammad Nur  
Rizki Priyatna

### Data dan Dokumentasi

Reno Bima Yudha  
Reyhan Pradipta

### Sekretariat

Nunik Purwardi  
Muhammad Anwar  
Aditya Nurlyu  
Siti Azizah  
Reno Bima Yudha

# Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Buku Saku Program Prioritas 2023 Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) RI ini dapat tersusun dengan baik.

Buku Saku ini disusun sebagai panduan praktis dalam memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) KI Pusat RI yang meliputi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional, Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), dan Monitoring evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Pusat.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi keharusan dalam berbagai aspek kehidupan. Terlebih setelah lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, gagasan untuk menghadirkan informasi publik yang benar, akurat dan bertanggung jawab menjadi tak terhindarkan. Kesadaran akan pentingnya pemenuhan informasi publik bagi masyarakat mendorong pemerintah dan badan-badan publik harus melakukan berbagai terobosan, untuk bisa menghadirkan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga akhir penyusunan buku ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Buku Saku ini dapat memberikan banyak informasi yang bermanfaat mengenai hasil analisis terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, menjadi yurisprudensi terhadap berbagai sengketa informasi publik, dan pelaksanaan Monev Badan Publik oleh KI Pusat RI. Pada tahap selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.

Jakarta, Mei 2024



Rospita Vici Paulyn  
Komisioner KI Pusat RI

**Daftar Isi**

Pendahuluan	1
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	2
Penyelesaian Sengketa Informasi	17
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	43

## Pendahuluan

**MEMASUKI** tahun 2023, Komisi Informasi Pusat melaksanakan beberapa terobosan program, lima diantaranya: Anugerah Tinar Buku berupa Apresiasi terhadap pimpinan badan publik daerah terbaik dalam keterbukaan informasi publik; Dimulainya inisiasi Hari Keterbukaan Informasi Nasional melalui momen pada Tinar Buku; Rangkaian Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional sebagai sarana konsolidasi dan harmonisasi; Menuntaskan tahun ketiga sebagai rangkaian terakhir KUP berdasarkan metodologi perdana; Dilakukannya inisiasi pengawasan performa penyelenggara pemilu.

Kinerja Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada tahun 2023, sangat mengembirakan. Pasalnya, target Program Prioritas Nasional yang diamanatkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dapat dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Indikator keberhasilan kinerja Komisi Informasi Pusat berdasarkan RPJMN Tahun 2023, dapat diukur dengan tercapainya target yang ditetapkan yaitu, (1) Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebanyak 100 Register, (2) Badan Publik yang Informatif berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebanyak 100 Badan Publik Informatif, dan (3) Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik mencapai Skor Nasional dengan Nilai 73.

Target capaian Program Prioritas Nasional Komisi Informasi Pusat ditahun 2023 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Program Prioritas Nasional	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	32	32	80
2	Badan Publik yang Informatif berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	35	40	46
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	35	72

Selain target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut, terdapat beberapa program dan kegiatan penunjang dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik harus diselesaikan. Puji syukur, berbagai tantangan, dinamika yang ada di tahun 2023, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mampu melewati dengan baik yang pada akhirnya seluruh target RPJMN dapat tercapai dengan baik, demikian juga dengan pelaksanaan program dan kegiatan penunjang lainnya serta capaian realisasi anggaran dengan persentase mencapai 97,77%.



**INDEKS**  
**KETERBUKAAN**  
**INFORMASI PUBLIK**



**iKIP**  
INDEKS KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK



## Latar Belakang

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara. Negara harus hadir dengan semangat transparan dan akuntabel dalam tata kelola penyelenggaraan negara, serta di sisi lain meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- Sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi publik melalui Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang merupakan Program Prioritas Nasional dan salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (RPJMN).
- Untuk mengukur sejauh mana implementasi UU KIP di 34 Provinsi se-Indonesia, Indeks menganalisis 3 aspek penting yaitu:
  - Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*),
  - Persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan
  - Kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*).

## Maksud dan Tujuan

IKIP disusun untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi terkait pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik serta upaya-upaya pemerintah RI dalam melaksanakan kewajibannya di 34 provinsi di Indonesia dan nasional.

Sebagai *helicopter view*, IKIP memotret badan-badan publik dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten/kota. IKIP juga memberikan gambaran disparitas baik antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar daerah, juga kesenjangan yang terjadi antara desa dengan kota, antara Jawa dengan luar Jawa, atau kesenjangan antara Wilayah Barat Indonesia dengan Wilayah Timur Indonesia.

Selain itu, ada beberapa tujuan lain yang pada gilirannya akan membawa manfaat besar, baik bagi masyarakat maupun negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien.

Sebagai penelitian, aspek yang diukur dalam IKIP adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum, dimana ketiga hal ini merupakan bidang-bidang penting yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga harus disorot secara tajam.

IKIP diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di segala tingkatan pemerintahan secara merata dan memberikan masukan serta rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.

IKIP juga diharapkan bisa memberikan laporan pencapaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sebagai bahan utama pemerintah republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional; serta dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun investasi asing.

## Apa perbedaan IKIP dengan Monev KIP?

IKIP adalah *helicopter view* atas pelaksanaan kewajiban (*respect, protect, and fulfill*) dan capaian negara, serta melihat kemajuan masyarakatnya. Hasilnya digunakan untuk kerja-kerja lintas K/L dan laporan negara.



Monitoring dan evaluasi atau Monev merujuk kepada hasil pemantauan kinerja badan publik berdasarkan mandat UU.



# Data Informan Ahli dan Tim Penyelia Nasional

306

Informan Ahli



17

Dewan  
Penyelia  
Nasional



## Berdasar usia



## Berdasar unsur



## Berdasar gender



## Berdasar pendidikan



## Dimensi IKIP 2023



### Perbandingan hasil IKIP berdasar dimensi

Dimensi	Indeks 2021	Indeks 2022	Perubahan	Indeks 2023	Perubahan
Fisik/Politik	70,41	74,53	4,12	75,73	1,20
Ekonomi	69,88	74,84	5,96	74,83	-0,01
Hukum	74,62	73,95	-0,64	75,22	1,24

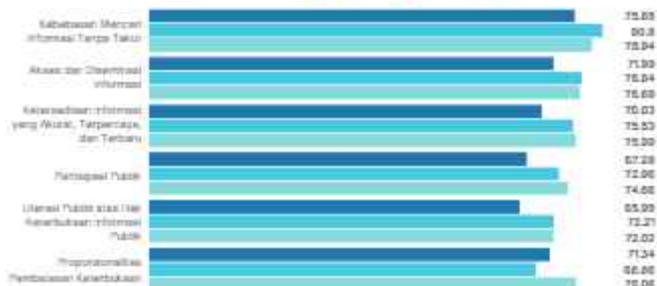
**Provinsi dengan skor baik:**  
Jabar, Riau, Bali, NTB, Aceh

**Provinsi dengan skor sedang:**  
Sumut, NTT, Babel, DIY, Jateng, Sulteng, Kaltim, Kalteng, Bengkulu, Sultra, Kalbar, Jambi, DKI Jakarta, Sulsel, Kepri, Kaltara, Sumbar, Sumsel, Jalim, Banten, Sulbar, Kalsel, Lampung, Sulut, Gorontalo, Papua, Maluku, Papua Barat, Maluku.

# IKIP 2021--2023

## Berdasarkan 20 Indikator

DIMENSI POLITIK ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

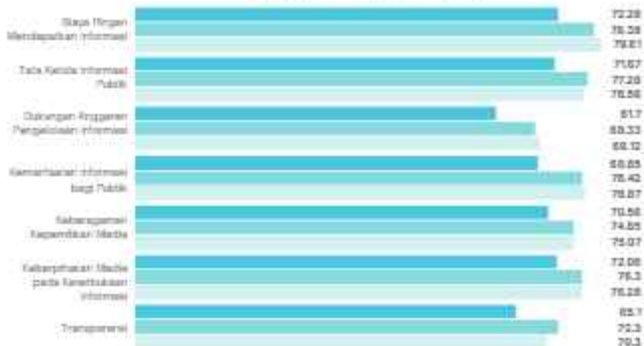


# IKIP 2021--2023

## Berdasarkan 20 Indikator

### DIMENSI EKONOMI

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

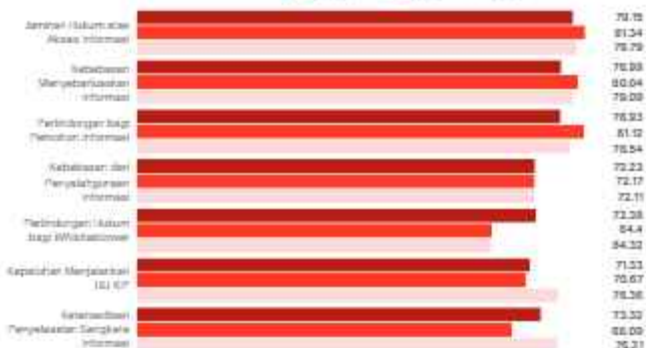


# IKIP 2021--2023

## Berdasarkan 20 Indikator

### DIMENSI HUKUM

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023





# Hasil IKIP 2023 dari Berbagai Perspektif

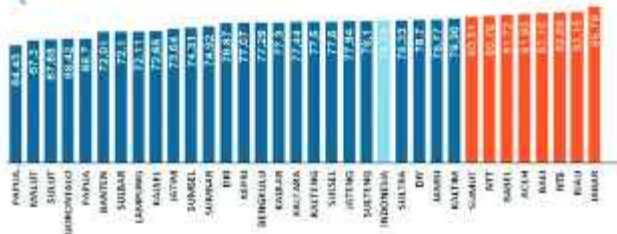


## IKIP Nilai IKIP Provinsi 2023

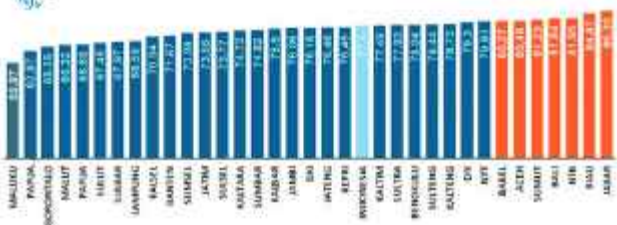




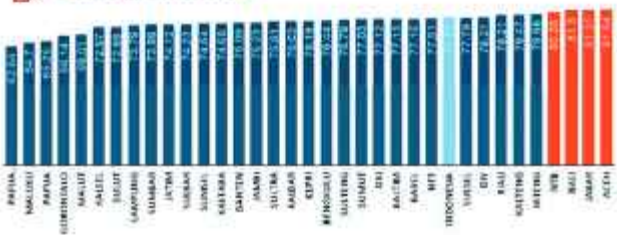
## SKOR DIMENSI FISIK/POLITIK



## SKOR DIMENSI EKONOMI



## SKOR DIMENSI HUKUM



Tabel Capaian IKIP 2023 di 34 Provinsi Berdasarkan Dimensi

Provinsi	Dimensi Fiskal/Padat			Dimensi Ekonomi			Dimensi Manusia			HASIL BOP		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
AGUM	78,7	825	85,36	76,57	89,09	86,21	80,51	75,43	81,31	79,56	83,42	+ 84,43
BAU	71,82	80,26	83,55	71,08	79	84,87	78,4	71,78	78,27	71,46	76,37	+ 82,43
BALI	82,41	85,69	82,36	82,03	82,36	81,84	85,01	79,09	81,3	82,3	82,5	+ 85,84
BEB	80,26	84,12	82,66	81,1	85,69	81,85	82,78	80,47	80,26	77,9	81,36	+ 83,88
BEK	78,27	81,85	81,81	77,27	84,29	80,48	82,37	78,88	81,84	79,53	80,09	+ 82,27
BENG	69,46	72,75	80,10	65,86	74,28	81,23	75,31	73,53	77,88	69,02	72,31	+ 79,62
BNT	76,7	75,42	80,76	74,9	73,05	79,91	80,38	74,44	77,11	77,1	73,39	+ 78,52
BANG	75,71	76,62	81,72	75,2	76,07	80,27	79,41	78,84	77,05	80,3	76,25	+ 79,36
BO	74,46	76,01	78,7	73,8	76,03	79,1	81,36	77,49	81,21	75,98	76,03	+ 81,43
BONE	82,76	75,64	77,96	70,48	76,40	76,40	76,66	72,67	75,68	71,46	74,25	+ 85,27
BUN	83,76	71,67	78,1	82,16	73,24	78,44	81,88	77	80,70	82,27	72,48	+ 80,31
BUR	75,66	80,38	79,36	74,68	81,57	77,49	80,68	76,57	77,01	76,96	77,58	+ 77,9
CELE	63,86	80,7	77,3	62,34	82,40	78,73	89,06	77,5	79,47	65,8	78,4	+ 79,87
DIY	71,53	81,61	77,26	68,87	82,54	78,04	70,75	71,12	84,44	70,88	78,77	+ 82,42
GOR	77,84	80,71	81,31	77,8	81,17	77,91	80,34	75,99	83,61	81,04	78,38	+ 77,9
HAL	70,38	76,03	77,3	71,02	79,64	75,5	83,46	77,30	76,03	80,38	76,36	+ 80,76
JAB	71,08	76,25	81,77	68,26	73,48	84,06	75,07	73,88	83,21	71,82	72,83	+ 81,7
JAM	89,57	80,14	86,81	87	80,47	76,16	73,80	74,07	77,01	70,27	70,25	+ 80,67
JAT	66,54	89,32	77,6	67,07	68,03	73,77	72,1	86,83	77,75	68,43	68,32	+ 76,64
JAT	76,11	75,75	77,07	71,03	75,25	84,49	80,77	74,25	74,88	75,3	71,07	+ 81,36
JAWA	89,37	76,43	77,44	67,94	75,08	74,71	71,34	82	74,88	69,84	73,85	+ 76,06
JOMB	68,36	76,74	74,92	67,25	77,02	74,92	75,39	74,47	73,99	70,4	74,47	+ 74,98
KAB	89,63	89,27	84,31	88,44	81,12	71,08	75,48	70,12	84,44	71,4	88,07	+ 81,7
KAN	87,22	75,49	78,44	64,99	75,87	71,36	62,31	88,85	74,52	66,82	71,03	+ 71,89
KAR	71,54	85,4	72,03	75,06	73,86	71,87	79,44	71,27	75,09	77,63	74,48	+ 79,18
KEM	69,57	89,04	81,1	62,78	85,64	67,97	77,34	80,06	74,25	71,36	70,06	+ 82,36
KEN	67,86	68,07	72,86	68,8	71,04	70,34	70,09	71,78	72,37	68,27	68,33	+ 82,21
KOR	58	67,9	70,75	66,81	68,04	68,18	74,81	86,49	71,76	69,88	67,52	+ 71,82
KRI	66,48	71,07	67,88	65,67	80,52	67,45	69,3	74,54	71,96	62,8	70,83	+ 81,21
KUM	66,29	80,44	68,42	62,81	71	61,25	64,56	71,07	68,36	61,27	70,74	+ 67,88
KUN	64,81	77,02	68,7	65,75	60,98	66,68	71,31	67,94	62,25	66,94	60,26	+ 67,52
KUT	62,38	58,4	67,3	61,38	49,87	66,52	65,4	60,27	69,03	61,8	54,81	+ 67,03
LAMP	44,48	61,7	64,43	41,52	58,38	62,87	66,44	68,73	62,84	47,48	61,68	+ 64,36
LAT	67,75	75,35	74,08	67,75	70,6	70,97	72,07	71,03	64,7	68,78	75,03	+ 80,25
MAK	71,12	75,2	76,09	70,36	85,46	70,4	85,86	73,28	81,02	73,07	74,42	+ 81,4

**Tabel Perubahan IKIP Provinsi 2022–2023**

No	Provinsi	2022	Peringkat	2023	Peringkat	Perubahan 2022–2023	Perubahan	Perubahan Peringkat
1	AKIH	83,42	7	84,43	7	1,01	-	0
2	BAN	85,37	12	86,43	2	0,06	▲	10
3	BAN	82,25	2	81,88	3	-0,37	▼	-1
4	BAN	81,36	3	81,81	4	0,45	▼	-1
5	ACEH	80,09	44	81,27	9	1,18	▼	-1
6	BAN	73,33	27	76,67	6	3,34	▲	21
7	BAN	73,09	23	76,63	7	3,54	▲	26
8	BAN	74,25	18	79,36	8	5,11	▲	10
9	DIY	74,01	20	76,67	8	2,66	▲	11
10	JAWA	74,26	19	76,27	10	2,01	▲	9
11	SULAW	72,46	28	76,71	11	4,25	▲	16
12	KALIM	71,88	8	77,9	12	6,02	▼	-4
13	KALING	69,4	8	77,87	13	8,47	▼	-1
14	BENGKALU	79,77	6	77,42	14	-2,35	▼	-9
15	SULAW	68,31	7	77,32	15	9,01	▼	-6
16	KALIM	76,96	17	76,79	16	-0,17	▼	-5
17	JAWA	72,83	29	76,7	17	3,87	▲	8
18	DIY	77,25	9	76,67	18	-0,58	▼	-6
19	SULAW	65,72	31	76,64	19	10,92	▲	12
20	DIY	73,32	23	76,36	20	3,04	▲	3
21	BALIKAP	73,05	21	76,06	21	2,91	-	0
22	BENGKALU	74,43	17	75,4	22	0,97	▼	-6
23	SUMBAR	74,47	18	74,58	23	0,11	▼	-1
24	SUMSEL	69,07	33	74,1	24	5,03	▲	5
25	DIY	73,23	24	73,66	25	0,43	▼	-1
26	BANTEN	74,49	16	73,12	26	-1,37	▼	-6
27	SUMBAR	69,08	26	72,38	27	3,3	▲	1
28	KALIM	65,33	30	72,27	28	6,94	▲	-2
29	LAMPUNG	67,82	32	71,82	29	4	▲	3
30	SULAW	75,63	14	70,21	30	-5,42	▼	-16
31	GORONTALO	67,34	30	67,69	31	0,35	▼	-21
32	PAPUA	60,26	34	67,62	32	7,36	▲	2
33	MALUT	64,59	25	67,13	33	2,54	▲	7
34	PAPUA BARAT	61,62	32	64,56	34	2,94	▼	-1
35	BALIKU	75,81	13	60,79	35	-15,02	▼	-23



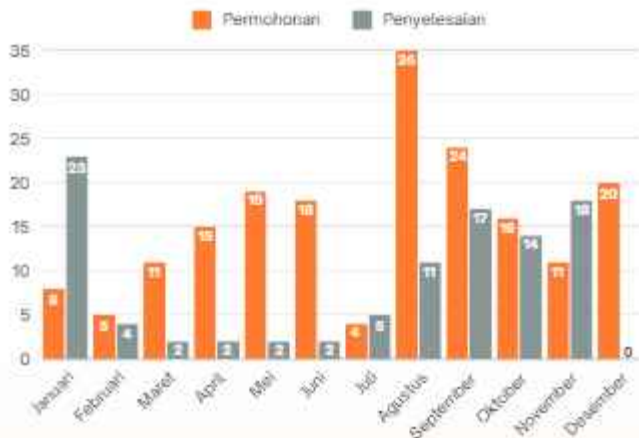
# **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

---

PSI

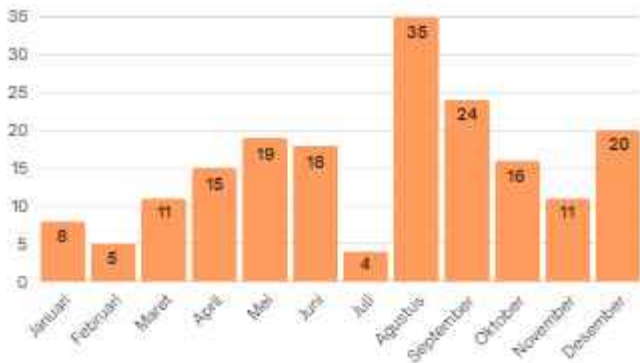
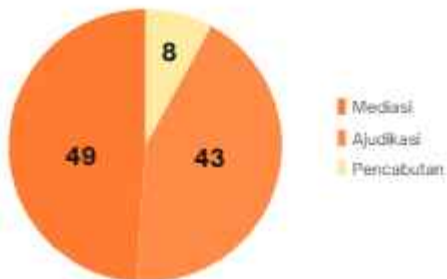


Salah satu tugas utama Komisi Informasi Pusat adalah menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat sejak berdiri sebanyak 3336 register yang sudah diselesaikan sebanyak 3142. Adapun sisa register yang belum diselesaikan adalah 194 register yang akan diselesaikan di tahun 2024. Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan Program Prioritas Nasional yang target penyelesaian sengketa setiap tahun mengalami kenaikan. Selama tahun 2023 Komisi Informasi Pusat sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMN yaitu 100 register sengketa yang diselesaikan. Hal ini berbanding dengan permohonan yang masuk, sebagaimana dijelaskan dalam grafik berikut:





## Permohonan Penyelesaian Sengketa Tahun 2023

Sengketa Informasi Tahun 2023  
Berdasarkan Jenis Penyelesaian

**57**  
Permohonan  
Perurangan



**129**  
Permohonan  
Berbadan Hukum

Putusan Komisi Informasi bukan putusan akhir dalam penyelesaian. Para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan komisi informasi ke PTUN atau Pengadilan Negeri. Selama tahun 2023 ada 4 putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan ke PTUN yaitu:

No	Register	Pemohon	Termohon
1	016/VI/KIPPS-A/2020	ICW	Kementerian Keuangan
2	99/IX/KIPPS/2022	Etondi Gazal, M.P.S. Ph.D.	Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
3	058/IX/KIPPS/2019	Pemantau Keuangan Negara	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemetaan Air Cibung-Cadane
4	042/IX/KIPPS-A/2021	Kontras	Kementerian Sekretariat Negara

Komisi Informasi Pusat selama tahun 2023 memiliki target sengketa putus sebanyak 100 register. Hal ini berbanding dengan permohonan yang masuk sebanyak 186 register seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Bulan	Permohonan	Penyelesaian
Januari	8	23
Februari	5	4
Maret	11	2
April	15	2
Mai	19	2
Juni	18	2
Juli	4	5
Agustus	35	11
September	24	17
Oktober	16	14
November	11	15
Desember	20	0
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>100</b>









No	KeterANGAN	Informasi yang Ditomboni	Masa	Arahan Pijakan
17	Judul: (01/02/2022) Persepsi dan Perilaku Berkeadilan di Era Digital dan Industri 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulasi PT (01/02/2022) Persepsi dan Perilaku Berkeadilan di Era Digital dan Industri 4.0</li> </ul>	Masa	PT (01/02/2022) Persepsi dan Perilaku Berkeadilan di Era Digital dan Industri 4.0
18	Judul: (02/03/2022) Persepsi dan Perilaku Berkeadilan di Era Digital dan Industri 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (02/03/2022) Persepsi dan Perilaku Berkeadilan di Era Digital dan Industri 4.0</li> </ul>	Masa	-
19	Judul: (03/04/2022) Persepsi dan Perilaku Berkeadilan di Era Digital dan Industri 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (03/04/2022) Persepsi dan Perilaku Berkeadilan di Era Digital dan Industri 4.0</li> </ul>	Masa	-
20	Judul: (04/05/2022) Persepsi dan Perilaku Berkeadilan di Era Digital dan Industri 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (04/05/2022) Persepsi dan Perilaku Berkeadilan di Era Digital dan Industri 4.0</li> </ul>	Masa	-





No	Keterangan	Informasi yang Dimasukkan	Hasil	Arajar Puluhan
26	Regulasi: OIC/RES/15/2021 Peraturan Bank Syariah Indonesia Tentang Cara Kerja Syariah Sesuai dengan Syariah Islam		Melihat	-
27	Regulasi: OIC/RES/15/2022 Peraturan Bank Syariah Indonesia Tentang Cara Kerja Syariah Sesuai dengan Syariah Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan No. 10/Per/Men/10/2022, dan 22/Per/Men/10/2022</li> <li>• Peraturan Menteri Perdagangan No. 10/Per/Men/10/2022, dan 22/Per/Men/10/2022</li> </ul>	Melihat	-
28	Regulasi: OIC/RES/15/2022 Peraturan Bank Syariah Indonesia Tentang Cara Kerja Syariah Sesuai dengan Syariah Islam		Melihat	-
29	Regulasi: OIC/RES/15/2022 Peraturan Bank Syariah Indonesia Tentang Cara Kerja Syariah Sesuai dengan Syariah Islam		Melihat	-
30	Regulasi: OIC/RES/15/2022 Peraturan Bank Syariah Indonesia Tentang Cara Kerja Syariah Sesuai dengan Syariah Islam	BANK SYARIAH INDONESIA	Ajak cari	Puluhan pada Syariah Indonesia
31	Regulasi: OIC/RES/15/2022 Peraturan Bank Syariah Indonesia Tentang Cara Kerja Syariah Sesuai dengan Syariah Islam	Kebijakan terkait dengan syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah lainnya.	Ajak cari	Puluhan pada Syariah Indonesia
32	Regulasi: OIC/RES/15/2022 Peraturan Bank Syariah Indonesia Tentang Cara Kerja Syariah Sesuai dengan Syariah Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan keuangan dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah lainnya.</li> <li>• Laporan keuangan dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah lainnya.</li> <li>• Laporan keuangan dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah lainnya.</li> </ul>	Ajak cari	





No	Keterangan	Informasi yang Dimohonkan	Hasil	Araut Puluhan
42	No. dan Tanggal Keputusan Perencanaan APD Terminasi dan/atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT)		Perencanaan	-
43	No. dan Tanggal Keputusan Perencanaan APD Terminasi PKWT		Perencanaan	-
44	No. dan Tanggal Keputusan Perencanaan APD Terminasi PKWT		Perencanaan	-
45	No. dan Tanggal Keputusan Perencanaan APD Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT)		Perencanaan	-
46	No. dan Tanggal Keputusan Perencanaan APD Terminasi dan/atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT)	Perencanaan dan/atau Pelaksanaan S.K. - Di bawah Jabatan Perencanaan dan/atau Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah	Aksi	Menindak Perencanaan/Pelaksanaan untuk mendukung Perencanaan/ Pelaksanaan/ dan/atau Pelaksanaan
47	No. dan Tanggal Keputusan Perencanaan APD Terminasi dan/atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT)	Perencanaan yang ditinjau pada rencana pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perencanaan atau aksi atau pelaksanaan PKWT/ dan/atau Pelaksanaan dan/atau Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah untuk melaksanakan atau melaksanakan kegiatan yang ditinjau sebagai terdapat dalam rencana pelaksanaan anggaran biaya dan/atau pelaksanaan	Aksi	Menindak Perencanaan/Pelaksanaan untuk mendukung Perencanaan/ Pelaksanaan/ dan/atau Pelaksanaan
48	No. dan Tanggal Keputusan Perencanaan APD Terminasi (KAB)	Perencanaan dan/atau Pelaksanaan dan/atau Pelaksanaan S.K. - Di bawah Jabatan Perencanaan dan/atau Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah	Medan	-
49	No. dan Tanggal Keputusan Perencanaan APD Terminasi (KAB)	Perencanaan dan/atau Pelaksanaan dan/atau Pelaksanaan S.K. - Di bawah Jabatan Perencanaan dan/atau Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah	Medan	-
50	No. dan Tanggal Keputusan Perencanaan APD Terminasi (KAB)	Perencanaan dan/atau Pelaksanaan dan/atau Pelaksanaan S.K. - Di bawah Jabatan Perencanaan dan/atau Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah	Medan	-













No	Kotirangan	Informasi yang Dibutuhkan	Hasil	Aman Pulusan
60	Kegiatan: 01/0000/PPQ/2023 Penerimaan Peserta Baktiwan 7 Terencana: 01/0000/PPQ/2023 Substansional	Sudah selesai pelaksanaan kegiatan, akan diluncurkan kembali (BPP) (Garis) Partisipasi Substansional (GPP) (No. 001/2015) s.d. 2020	Melaksanakan	-
61	Kegiatan: 01/0000/PPQ/2023 Penerimaan Peserta Baktiwan 7 Terencana: 01/0000/PPQ/2023 Substansional	Sudah selesai pelaksanaan kegiatan, akan diluncurkan kembali (BPP) (Garis) Partisipasi Substansional (GPP) (No. 001/2015) s.d. 2020	Melaksanakan	-
62	Kegiatan: 01/0000/PPQ/2023 Penerimaan Peserta Baktiwan 7 Terencana: 01/0000/PPQ/2023 Substansional	Sudah selesai pelaksanaan kegiatan, akan diluncurkan kembali (BPP) (Garis) Partisipasi Substansional (GPP) (No. 001/2015) s.d. 2020	Melaksanakan	-
63	Kegiatan: 01/0000/PPQ/2023 Penerimaan Peserta Baktiwan 7 Terencana: 01/0000/PPQ/2023 Substansional	Sudah selesai pelaksanaan kegiatan, akan diluncurkan kembali (BPP) (Garis) Partisipasi Substansional (GPP) (No. 001/2015) s.d. 2020	Melaksanakan	-
64	Kegiatan: 01/0000/PPQ/2023 Penerimaan Peserta Baktiwan 7 Terencana: 01/0000/PPQ/2023 Substansional	Sudah selesai pelaksanaan kegiatan, akan diluncurkan kembali (BPP) (Garis) Partisipasi Substansional (GPP) (No. 001/2015) s.d. 2020	Melaksanakan	-
65	Kegiatan: 01/0000/PPQ/2023 Penerimaan Peserta Baktiwan 7 Terencana: 01/0000/PPQ/2023 Substansional	Sudah selesai pelaksanaan kegiatan, akan diluncurkan kembali (BPP) (Garis) Partisipasi Substansional (GPP) (No. 001/2015) s.d. 2020	Melaksanakan	-
66	Kegiatan: 01/0000/PPQ/2023 Penerimaan Peserta Baktiwan 7 Terencana: 01/0000/PPQ/2023 Substansional	Sudah selesai pelaksanaan kegiatan, akan diluncurkan kembali (BPP) (Garis) Partisipasi Substansional (GPP) (No. 001/2015) s.d. 2020	Melaksanakan	-
67	Kegiatan: 01/0000/PPQ/2023 Penerimaan Peserta Baktiwan 7 Terencana: 01/0000/PPQ/2023 Substansional	Sudah selesai pelaksanaan kegiatan, akan diluncurkan kembali (BPP) (Garis) Partisipasi Substansional (GPP) (No. 001/2015) s.d. 2020	Melaksanakan	-



No	Keterangan	Informasi yang Dimohtakan	Hasil	Amar Putusan
100	<p>Regulasi: 125/2019/PL/10/2023                      Peraturan Menteri Ketenagakerjaan                      tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan                      Kementerian Agama RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dasar Hukum (sebelum Surat Editan Eksekusi No. 6/12/2022/10/2023, yaitu: Peraturan Menteri 2022;</li> <li>Selanjutnya Surat Keputusan Lembaga Ilmu Ilmiah dan Ilmu Ilmiah 2011</li> <li>Agenda 2022;</li> <li>Dasar Pengawasan Kewilayatan Badan Pengantar Piasa (BPP) Gereja Persepsi</li> <li>Tahapannya (GPT) Negara Uluar Pili, Child, Pemasangan, dan</li> <li>Dasar Pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia</li> </ul>	<p>Keselamatan</p>	<p>•</p>
100	<p>Regulasi: 125/2019/PL/10/2023                      Peraturan Menteri Ketenagakerjaan                      Kementerian Agama RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dasar Hukum (sebelum Surat Editan Eksekusi No. 6/12/2022/10/2023, yaitu: Peraturan Menteri 2022;</li> <li>Selanjutnya Surat Keputusan Lembaga Ilmu Ilmiah dan Ilmu Ilmiah 2011</li> <li>Agenda 2022;</li> <li>Dasar Pengawasan Kewilayatan Badan Pengantar Piasa (BPP) Gereja Persepsi</li> <li>Tahapannya (GPT) Negara Uluar Pili, Child, Pemasangan, dan</li> <li>Dasar Pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia</li> </ul>	<p>Keselamatan</p>	<p>•</p>

# Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (MONEV)



Komis Informasi berdasarkan Pasal 23 UU KIP, adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta Pasal 26 ayat [1] huruf (b) dan huruf (c) UU KIP bahwa pada pokoknya Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 UU KIP, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Implementasi Perki SLIP pada Badan Publik selanjutnya dilakukan pemantauan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Perki Monev).

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dilakukan melalui rangkaian tahapan, metode, dan indikator penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui pedoman ini. Sehingga Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara akurat, cepat, dan sederhana.

## Maksud dan Tujuan

- Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik.
- Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik.
- Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik.
- Memberikan masukan (*feed back*) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

## Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan lain yang berhubungan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

## Badan Publik Objek Monev KIP 2023

Badan Publik Objek Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 adalah:

- Kementerian
- Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Lembaga Non Struktural
- Perguruan Tinggi Negeri
- Badan Usaha Milik Negara
- Partai Politik
- Pemerintah Provinsi

## Tantangan Monev KIP 2023

Badan Publik harus mampu untuk:

- Identifikasi informasi yang dibutuhkan masyarakat
  - Informasi berkaitan langsung dengan Publik
  - Informasi berkaitan tidak langsung dengan Publik
  - Informasi berkaitan dengan tupoksi/fungsi Badan Publik
- Inovasi  
 Inovasi bukan semata tentang kecanggihan, tetapi perlu dilandaskan pada hal-hal yang prinsip terkait akses informasi publik, yakni cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

## Tahapan Monev KIP 2023



## Parameter dan Pembobotan

Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- **Sarana dan prasarana** yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik
- **Kualitas informasi** adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi, dan kekinian (terbaru)
- **Jenis informasi** adalah informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 PerKI 1/2021 tentang SLIP
- **Komitmen organisasi** adalah dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tupoksi
- **Digitalisasi** adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- **Inovasi dan strategi** adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi

Penilaian kuesioner meliputi evaluasi terhadap terhadap aspek-aspek standar layanan informasi sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Parameter
1	KUALITAS INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala</li> <li>• Informasi dikumpulkan</li> <li>• Daftar Informasi Publik</li> </ul>
2	PELAYANAN INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur</li> <li>• Subotansi</li> <li>• Pelaporan/complain handle</li> </ul>
3	JENIS INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Setiap Saat</li> <li>• Informasi Terbuka Lainnya</li> </ul>
4	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronik</li> <li>• Non elektronik</li> </ul>
5	KOMITMEN ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil PPID lengkap disertai tugas, regulasi, dan struktur</li> <li>• Pelaksanaan tugas Atasan PPID</li> <li>• Pelaksanaan tugas PPID Utama</li> <li>• Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi</li> <li>• Kepatuhan menjalankan keputusan Komisi Informasi</li> </ul>
6	DIGITALISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi/apk/apk teknologi informasi berkaitan dengan keterbukaan informasi</li> <li>• Penyediaan platform dalam Play Store</li> <li>• Aktivitas media sosial</li> </ul>



## Kualifikasi Badan Publik



### KEMENTERIAN



### LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA NON KEMENTERIAN



### LEMBAGA NON STRUKTURAL



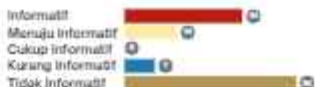
### PEMERINTAH PROVINSI



### BADAN USAHA MILIK NEGARA



### PERGURUAN TINGGI NEGERI



### PARTAI POLITIK



### Hasil Money Badan Publik 2022--2023

No	Badan Publik	Kualitas									
		Informatif		Menyug. Informatif		Cukup Informatif		Kurang Informatif		Tidak Informatif	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Kementerian	30	29	1	3	3	-	-	2	-	-
2	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	17	23	5	8	2	1	9	7	9	3
3	Lembaga Non Struktural	5	9	5	2	1	3	4	2	19	19
4	Pemerintah Provinsi	21	15	3	6	8	5	2	6	2	2
5	Badan Usaha Milik Negara	19	25	9	10	8	3	5	3	25	25
6	Perguruan Tinggi Negeri	25	34	12	14	4	-	3	7	100	94
7	Partai Politik	3	3	1	-	-	3	3	-	-	3
<b>Total</b>		<b>122</b>	<b>139</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>156</b>	<b>147</b>

### Hasil Money Badan Publik 2023

**Informatif**

KEMENTERIAN		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	96,72
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96,39
3	Kementerian Pertanian	96,11
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	96,09
5	Kementerian Pemuda dan Olahraga	95,80
6	Kementerian Perhubungan	95,76
7	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	95,64

No	Nama Badan Publik	Nilai
8	Kementerian Keuangan	95,63
9	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	95,45
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	95,42
11	Kementerian Perdagangan	95,34
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	94,61
13	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	94,11
14	Kementerian Ketenagakerjaan	93,91
15	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	93,82
16	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	93,33
17	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	92,49
18	Kementerian Luar Negeri	91,96
19	Kementerian Perindustrian	91,68
20	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	91,63
21	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	91,60
22	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	90,98
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	90,21
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	90,19
25	Kementerian Sekretariat Negara	90,05
26	Kementerian Dalam Negeri	90,02
27	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90,01
28	Kementerian Pertahanan	90,01
29	Kementerian Agama	90,00

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	98,14
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	98,02
3	Otoritas Jasa Keuangan	97,76
4	Radio Republik Indonesia	97,32
5	Sekretariat Kabinet	96,72
6	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	96,65
7	Dewan Perwakilan Rakyat	95,70
8	Mahkamah Agung	94,85
9	Bank Indonesia	94,32
10	Badan Riset dan Inovasi Nasional	93,99
11	Badan Informasi Geospasial	93,62
12	Lembaga Administrasi Negara	93,18
13	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	92,94
14	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	92,52

No	Nama Badan Publik	Nilai
15	Komisi Yudisial	91,69
16	Badan Pemeriksa Keuangan	91,55
17	Badan Standardisasi Nasional	91,38
18	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	91,34
19	Badan Pusat Statistik	90,86
20	Mahkamah Konstitusi	90,24
21	Lembaga Penjamin Simpanan	90,20
22	Badan Kepegawainan Negara	90,19
23	Lembaga Ketahanan Nasional	90,13

**LEMBAGA NON STRUKTURAL**

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Komisi Pemilihan Umum	98,37
2	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	96,25
3	Ombudsman Republik Indonesia	94,37
4	Badan Amil Zakat Nasional	94,21
5	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	92,50
6	Dewan Ketahanan Nasional	92,30
7	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	91,63
8	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	90,56
9	Komisi Pemberantasan Korupsi	90,02

**PEMERINTAH PROVINSI**

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Pemerintah Aceh	98,37
2	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	96,77
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	96,05
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	95,53
5	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	95,35
6	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	94,77
7	Pemerintah Provinsi Bali	94,32
8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	93,94
9	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	93,60
10	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	93,59
11	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	93,28
12	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	92,00
13	Pemerintah Provinsi Lampung	91,57
14	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	90,14
15	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	90,04

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	PT. Brantas Abipraya (Persero)	97,62
2	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	97,62
3	PT. Taspen (Persero)	97,54
4	PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	97,33
5	PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	97,29
6	PT. Bio Farma (Persero)	97,22
7	Perum Perumnas	97,20
8	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	97,19
9	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	97,19
10	PT. Hutama Karya (Persero)	97,00
11	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	96,73
12	PT. Jasa Marga (Persero) Tbk	96,69
13	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	96,63
14	PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	95,48
15	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	95,00
16	Perum Perhutani	94,62
17	Perum Damri	94,52
18	PT. Pupuk Indonesia (Persero)	94,44
19	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	93,60
20	Perum Jasa Tirta II	93,30
21	Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)	93,10
22	PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk	92,85
23	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)	91,70
24	PT. Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)	91,11
25	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	90,44
26	PT. Pertamina (Persero)	90,36

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Universitas Negeri Malang	99,29
2	Universitas Gadjah Mada	98,44
3	Universitas Brawijaya	98,30
4	Universitas Lampung	98,19
5	Universitas Bangka Belitung	98,13
6	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	98,10
7	Universitas Udayana	97,96
8	Universitas Airlangga	97,66
9	Universitas Sumatera Utara	96,93
10	Universitas Padjadjaran	96,40
11	Universitas Bengkulu	96,29

No	Nama Badan Publik	Nilai
12	Universitas Mataram	96,20
13	Universitas Negeri Jakarta	96,14
14	Institut Teknologi Bandung	95,97
15	Universitas Tidar	95,91
16	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	95,83
17	Universitas Tanjungpura	95,43
18	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	95,24
19	Universitas Negeri Gorontalo	95,21
20	Universitas Negeri Yogyakarta	95,03
21	Universitas Pendidikan Ganesha	94,53
22	Institut Pertanian Bogor	94,08
23	Universitas Jenderal Soedirman	93,81
24	Universitas Indonesia	93,80
25	Universitas Negeri Padang	93,60
26	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	93,52
27	Universitas Andalas	93,21
28	Universitas Negeri Surabaya	93,00
29	Universitas Hassanuddin	92,78
30	Universitas Sialih Kuala	92,23
31	Universitas Jember	91,76
32	Universitas Sriwijaya	91,69
33	Universitas Sebelas Maret	91,35
34	Universitas Negeri Makassar	90,25

**PARTAI POLITIK**

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI*)	95,94
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	95,94
3	Partai Demokrat	95,24

**Menuju Informatif****KEMENTERIAN**

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Kementerian Kesehatan	86,35
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	84,84
3	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	83,63

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Dewan Perwakilan Daerah	88,09
2	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	84,94
3	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	84,63
4	Televisi Republik Indonesia	81,87
5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	81,20
6	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	81,00
7	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	80,89
8	Perpustakaan Nasional	80,08

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Lembaga Sensor Film	87,57
2	Badan Nasional Serifikasi Profesi	84,62

PEMERINTAH PROVINSI		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	87,32
2	Pemerintah Provinsi Riau	87,28
3	Pemerintah Provinsi Maluku	87,03
4	Pemerintah Provinsi Gorontalo	85,98
5	Pemerintah Provinsi Banten	84,61
6	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	83,71

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Perum Jasa Tirta 1	89,00
2	PT. Industri Kereta Api (Persero)	88,87
3	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	88,65
4	PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	88,55
5	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk	87,44
6	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	85,62
7	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	82,87
8	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	82,84
9	PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	80,93
10	PT. Pos Indonesia (Persero)	80,83

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Universitas Maritim Raja Ali Haji	88,55
2	Institut Teknologi Sumatera	88,18
3	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	87,92
4	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	87,87
5	Institut Agama Islam Negeri Kediri	86,38
6	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	86,14
7	Universitas Negeri Semarang	85,94
8	Universitas Pendidikan Indonesia	85,80
9	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	85,65
10	Institut Teknologi Kalimantan	84,93
11	Institut Seni Indonesia Denpasar	84,61
12	Universitas Diponegoro	83,76
13	Universitas Lambung Mangkurat	82,91
14	Universitas Trunojoyo Madura	82,74

#### Cukup Informatif

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	79,18

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Komisi Aparatur Sipil Negara	78,60
2	Badan Pengawas Pemilu	78,68

PEMERINTAH PROVINSI		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	79,45
2	Pemerintah Provinsi Papua	79,12
3	Pemerintah Provinsi Jambi	77,54
4	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	77,18
5	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	77,06



BADAN USAHA MILIK NEGARA		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	PT. Len Industri (Persero)	78,64
2	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk	78,83

PARTAI POLITIK		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	79,54
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	73,06
3	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	69,00

#### Kurang Informatif

KEMENTERIAN		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	43,64
2	Kementerian Sosial	40,56

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	59,20
2	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	57,36
3	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	54,10
4	Badan Siber dan Sandi Negara	53,28
5	Kejaksaan Agung RI	51,60
6	Badan Intelijen Negara	48,20
7	Badan Narkotika Nasional	47,20

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Badan Pengelola Keuangan Haji	54,48
2	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	42,74

<b>KEMENTERIAN</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Badan Publik</b>	<b>Nilai</b>
1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	43,64
2	Kementerian Sosial	40,56

<b>LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Badan Publik</b>	<b>Nilai</b>
1	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	59,20
2	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	57,36
3	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	54,10
4	Badan Siber dan Sandi Negara	53,28
5	Kejaksaan Agung RI	51,60
6	Badan Intelijen Negara	48,20
7	Badan Narkotika Nasional	47,20

<b>LEMBAGA NON STRUKTURAL</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Badan Publik</b>	<b>Nilai</b>
1	Badan Pengelola Keuangan Haji	54,48
2	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	42,74

<b>PEMERINTAH PROVINSI</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Badan Publik</b>	<b>Nilai</b>
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	59,88
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	53,28
3	Pemerintah Provinsi Bengkulu	52,24
4	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	51,94
5	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	50,18
6	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	49,58

<b>BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Badan Publik</b>	<b>Nilai</b>
1	PT. Barata Indonesia (Persero)	55,92
2	PT. Virama Kaiya (Persero)	53,76
3	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	48,54

PERGURUAN TINGGI NEGERI		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Institut Seni Indonesia Surakarta	54,60
2	Universitas Riau	53,80
3	Universitas Negeri Medan	52,92
4	Universitas Jambi	50,32
5	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	43,84
6	Universitas Borneo Tarakan	43,60
7	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	40,58

### Tidak Informatif

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAAN		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Tentara Nasional Indonesia	24,78
2	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	17,60
3	Kepolisian Republik Indonesia	0,00

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Komisi Kepolisian Nasional	39,88
2	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	33,98
3	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	32,32
4	Komisi Penyiaran Indonesia	28,38
5	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	23,34
6	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	23,00
7	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	21,06
8	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	8,82
9	Dewan Pers	0,40
10	Komite Akreditasi Nasional	0,00
11	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	0,00
12	Dewan Jaminan Sosial Nasional	0,00
13	Komisi Kejaksaan RI	0,00
14	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	0,00
15	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	0,00
16	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	0,00
17	Konsil Kedokteran Indonesia	0,00
18	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	0,00
19	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	0,00

PEMERINTAH PROVINSI		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	20,00
2	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,40

BADAN USAHA MIJK NEGARA		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	34,72
2	PT. Reasuransi Indonesia Utama(Persero)	31,60
3	Perum BULOG	30,20
4	PT. Yodya Karya (Persero)	28,92
5	PT. Djakarta Lloyd (Persero)	28,42
6	PT. Danareksa (Persero)	28,20
7	PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	27,12
8	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	22,72
9	PT. Amarta Karya (Persero)	17,24
10	PT. ASABRI (Persero)	14,24
11	PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)	5,76
12	PT. Indah Karya (Persero)	0,64
13	PT. Istaka Karya (Persero)	0,00
14	PT. PDI Pulau Batam (Persero)	0,00
15	PT. Boma Bima Indra (Persero)	0,00
16	PT. PANN (Persero)	0,00
17	PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	0,00
18	PT. Varuna Tirta Prakarya (Persero)	0,00
19	PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	0,00
20	PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)	0,00
21	PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	0,00
22	PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	0,00
23	PT. Bina Karya (Persero)	0,00
24	PT. Pyramissima (Persero)	0,00
25	Perum Produksi Film Negara	0,00
26	PT. Semen Kupang (Persero)	0,00

PERORUJAN TINGGI NEGERI		
No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Universitas Siliwangi	38,44
2	Universitas Mulawarman	37,36
3	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	31,46

No	Nama Badan Publik	Risal
4	Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya	30,98
5	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	29,48
6	Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare	27,44
7	Universitas Samudra	27,28
8	Universitas Negeri Manado	23,72
9	Universitas Timor	21,40
10	Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkeraya	21,18
11	Universitas Teuku Umar	18,42
12	Universitas Negeri Papua	16,26
13	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	14,86
14	Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya	13,44
15	Institut Agama Kristen Negeri Toraja	12,92
16	Universitas Sembilan Belas November Kolaka	10,98
17	Institut Seni Indonesia Padang Panjang	7,32
18	Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung	5,88
19	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja	1,04
20	Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	0,96
21	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	0,64
22	Universitas Musamus	0,48
23	Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekatongan	0,32
24	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	0,16
25	Universitas Tadulako	0,00
26	Institut Agama Islam Negeri Ternate	0,00
27	Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram	0,00
28	Universitas Sam Ratulangi	0,00
29	Universitas Pertahanan Indonesia	0,00
30	Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto	0,00
31	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu	0,00
32	Institut Agama Islam Negeri Kerinci	0,00
33	Universitas Cendrawasih	0,00
34	Universitas Sulawesi Barat	0,00
35	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	0,00
36	Institut Agama Kristen Negeri Tarulung	0,00
37	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	0,00
38	Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk Jayapura	0,00
39	Institut Agama Islam Negeri Kendari	0,00
40	Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa	0,00
41	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	0,00
42	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng	0,00
43	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	0,00
44	Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djembek Bukittinggi	0,00
45	Universitas Islam Negeri Mataram	0,00

No	Nama Badan Publik	Nilai
46	Institut Agama Islam Negeri Kudus	0,00
47	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	0,00
48	Institut Agama Islam Negeri Palopo	0,00
49	Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak	0,00
50	Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie	0,00
51	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	0,00
52	Institut Agama Islam Negeri Gajah Putih	0,00
53	Universitas Haluoleo	0,00
54	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	0,00
55	Institut Agama Islam Negeri Jural Siwo Metro	0,00
56	Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Seritani	0,00
57	Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	0,00
58	Universitas Palangkaraya	0,00
59	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	0,00
60	Institut Agama Islam Negeri Manado	0,00
61	Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya	0,00
62	Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua	0,00
63	Institut Agama Islam Negeri Sorong	0,00
64	Universitas Nusa Cendana	0,00
65	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	0,00
66	Institut Agama Islam Negeri Pontianak	0,00
67	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar	0,00
68	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	0,00
69	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	0,00
70	Universitas Islam Negeri Datokarama Palu	0,00
71	Institut Agama Kristen Negeri Kupang	0,00
72	Universitas Malikussaleh	0,00
73	Universitas Terbuka	0,00
74	Universitas Singaperbangsa Karawang	0,00
75	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	0,00
76	Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya	0,00
77	Universitas Islam Negeri Salatiga	0,00
78	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman	0,00
79	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	0,00
80	Institut Agama Islam Negeri Madura	0,00
81	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amal Gorontalo	0,00
82	Institut Agama Kristen Negeri Ambon	0,00
83	Universitas Khairun	0,00
84	Institut Agama Islam Negeri Curup	0,00
85	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	0,00
86	Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa	0,00
87	Universitas Pattimura	0,00

No	Nama Badan Publik	Nilai
88	Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan	0,00
89	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene	0,00
90	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	0,00
91	Institut Agama Islam Negeri Maikussaleh Lhokseumawe	0,00
92	Institut Agama Islam Negeri Arribon	0,00
93	Institut Agama Kristen Negeri Manado	0,00
94	Institut Agama Islam Negeri Bone	0,00

#### PARTAI POLITIK

No	Nama Badan Publik	Nilai
1	Partai Amanat Nasional	23,15
2	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	14,00
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	11,00

## **URGENSI KOMITMEN BERSAMA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA**

- Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang anti korupsi
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik serta mengawal informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan di ruang-ruang publik
- Memastikan pejabat-pejabat publik di masing-masing daerah untuk melaksanakan secara konkret Keterbukaan Informasi Publik
- Menciptakan masyarakat informatif





**KOMISIONER KOMISI INFORMASI PUSAT RI**

**PERIODE 2022--2026**







**KOMISI INFORMASI PUSAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Wisma BSG Lantai 9,  
Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir, RT 1/RW 8, DKI Jakarta 10160

 [komisiinformasi.go.id](http://komisiinformasi.go.id)  [@komisiinformasipusat](https://www.instagram.com/komisiinformasipusat)  [@KIPusat](https://twitter.com/KIPusat)

 [Komisi Informasi Pusat RI](https://www.facebook.com/komisiinformasipusat)  [Komisi Informasi Pusat](https://www.youtube.com/komisiinformasipusat)